

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan bagian integral dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat modern sekarang ini, karena dalam perekonomian modern mekanisme lalu lintas barang dan jasa dalam segala transaksinya memerlukan uang sebagai alat guna mencapai tujuan.¹ Dengan uang, setiap orang dapat membiayai segala macam kebutuhannya, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk modal kegiatan usaha. Permasalahannya adalah terkadang kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat mendesak untuk segera dipenuhi.

Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan uang dapat diperoleh dari bank, sebagai lembaga keuangan formal yang mempunyai peran memberikan pinjaman uang dalam bentuk pemberian kredit. Akan tetapi untuk kebutuhan uang yang mendesak, kredit bank ini akan sulit terpenuhi, karena penyaluran kredit bank yang didasarkan atas formula *"the five C's of credit bank"*,² prosedurnya rumit dan membutuhkan waktu yang tidak singkat,³ sehingga uang tidak dapat dengan segera diperoleh.

Adanya kendala pada prosedur kredit bank tersebut, bagi mereka yang terdesak kebutuhan uang dalam jumlah yang relatif kecil, pada umumnya diatasi dengan cara mencari pinjaman pada sumber keuangan/transaksi hanya membutuhkan waktu singkat, namun dengan risiko, bunga pinjamannya sangat

¹ Iswardono Sp, *Uang dan Bank*, BPFE-Yogyakarta Edisi Ketiga, 1989, hlm. 1

² Ari Purwadi, *"Perjanjian Baku Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank"*, *Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Tahun XXV, 1995, hlm. 48

³ M. Irsad, *Peran dan Prospek Perum Pegadaian dalam Masa Krisis*, Gema Stikubank Edisi XXV Nomor XII, 1998, hlm. 51

tinggi yaitu berkisar antara 10% sampai 30% bahkan sampai 40% perbulan.⁴ Bagi mereka yang memiliki barang berharga, kesulitan uang biasanya diatasi dengan cara menjual barangnya, akan tetapi risikonya, barang yang telah dijual sulit diperoleh kembali, padahal adakalanya barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan hanya karena terdesak kebutuhan uang terpaksa dilepas. Di samping itu, jumlah uang yang diperoleh jauh dibawah nilai barang, sehingga penjualan barang secara terpaksa, mengakibatkan timbulnya kerugian.

Alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut, solusi yang tepat adalah dengan cara gadai. Melalui gadai, seseorang yang membutuhkan uang menyerahkan barang kepada pihak lain yang bersedia memegangnya dengan seketika itu menerima dari pihak tersebut sejumlah uang tunai sebesar nilai harga barang, dengan hak mengambil kembali barangnya dikemudian hari denganmengembalikan sejumlah uang yang ia terima.⁵ Dengan cara gadai, kebutuhan uang dengan segera dapat terpenuhi tanpa harus menanggung beban bunga yang terlalu tinggi danada harapan untuk mendapatkan kembali barangnya.

Sistem gadai tersebut dalam praktiknya dilaksanakan oleh Perum Pegadaian sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang secara legal diberi kewenangan untuk memonopoli kegiatan usaha pegadaian di Indonesia.Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda.Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian

⁴ Siswanto Mudhofir, *Peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Sektor Informal*, Institut Bankir Indonesia, 2000, hlm. 38-44

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1963, hlm. 73

yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan Staatsblad nomor 226 tahun 1930, jawatan pegadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan pasal 2 IBWI (*Donesche Bedrijven Wet*) yang berbunyi : penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi.

Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1961, status lembaga pegadaian adalah jawatan pegadaian. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat menengah kebawah melalui penyediaan dana berdasarkan hukum gadai. Tujuannya membantu masyarakat kecil berpenghasilan rendah yang membutuhkan uang dalam waktu segera,⁶ agar tidak terjerat oleh dan terhindar dari praktik lintah darat (*profiteer*), pegadaian gelap (*illegal pawnshop*), atau pelepas uang (*money lender*) lainnya, yang cenderung memanfaatkan kebutuhan uang mendesak untuk memperoleh keuntungan sangat tinggi atau mencekik leher (*strangling*) secara tidak wajar yang merugikan masyarakat.⁷

Pegadaian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan dana dalam rentang nilai dari Rp 20.000,- sampai Rp 200.000.000,- untuk jangka

⁶ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 177

⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 108-109

waktu empat bulan dengan bunga antara 0,75 % sampai 1 % setiap 15 hari. Besarnya dana yang diberikan bergantung pada nilai barang, makin besar nilai barang makin besar dana yang diberikan.⁸Barang-barang yang dapat diterima berupa barang rumah tangga (perlengkapan dapur, perlengkapan makan), tekstil, perhiasan (emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia), barang elektronik dan barang lainnya yang dianggap bernilai oleh Pegadaian.⁹

M. Irsad mengemukakan beberapa keunggulan Pegadaian di banding dengan lembaga keuangan lainnya yaitu :1). *Prosesnya mudah*, tanpa persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi, cukup menunjukkan identitas diri dan menyerahkan barang; 2). *Murah*, tidak dikenakan biaya provisi, bea materai, maupun biaya lainnya,3). *Terjangkau*, karena barang-barang yang diterima pagadaian dapat dipenuhi oleh setiap rumah tangga dan 4). *Cepat*, yaitu dengan penyerahan barang uang langsung diterima.¹⁰

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad saw. yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.¹¹Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

⁸ *Ibid.* hlm. 108-109

⁹ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Op.Cit.* hlm. 183

¹⁰ M. Irsad, *Op.Cit.* hlm. 54

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15

Gadai syariah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.

Kata “**Rahn**” menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Menurut istilah, *Rahn* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut *syara'* sebagai jaminan utang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan ini seluruh atau sebagian uang dapat diberikan.¹² Dalam hukum Islam dasar berlakunya *Rahn* terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist dan *Ijtihad* para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Salah satu hasil *ijtihad* para *fuqaha* adalah penentuan mengenai siapa yang memikul biaya pemeliharaan barang jaminan selama di tangan *murtahin*.¹³

Berlakunya aturan tentang *Rahn* di Indonesia didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 yang berisi tentang ketentuan gadai syariah yang sesuai dengan hukum Islam dan harus ditempuh oleh seorang muslim apabila akan melakukan akad *Rahn*. Fatwa Dewan Syariah Nasional itu adalah sebagai berikut :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Gadai Syariah (*Rahn*) dibolehkan.

Kedua : Ketentuan Umum

¹² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 3

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, PT. Alma'arif, Bandung, 1983, hlm. 51

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seijin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*;
- 4) Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
- 5) Penjualan *Marhun* :
 - a) Apabila sudah jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Diterapkannya *Rahn* oleh Pegadaian Syariah, membawa konsekuensi hukum bahwa sekarang di Indonesia dikenal ada tiga jenis transaksi gadai, yaitu :

1. Gadai (*Pand*) menurut KUH. Perdata yang digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan usaha Bank Konvensional;
2. Gadai (*Verpanding*) menurut Aturan Dasar Pegadaian/ADP (*Pandhuis Reglement*) sebagai kegiatan usaha pokok pada Perum Pegadaian;
3. Gadai Syariah (*Rahn*) sebagai jaminan peminjaman uang pada kegiatan usaha Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

Dari ketiga jenis gadai tersebut, dua yang pertama sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Gadai (*Pand*) diatur dalam KUH. Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 dan Gadai pada Perum Pegadaian diatur dalam Aturan Dasar Pegadaian/ADP (***Pandhuis Regkement***) Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928, sedangkan *Rahn* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Rahn* sebagai pola hubungan hukum baru di bidang transaksi jaminan, menimbulkan keadaan *vacuum* atau kekosongan hukum di bidang Gadai Syariah. Dari uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan disusun dalam bentuk Tesis dengan judul :

Konstruksi Hukum Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perbandingan hukum Gadai Syariah (*Rahn*) dengan Gadai (*Pand*) dalam KUH.Perdata ?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum Gadai Syariah (*Rahn*) dalam sistem hukum JaminanIndonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan hukum Gadai Syariah (*Rahn*) dengan Gadai (*Pand*) dalam KUH.Perdata.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum Gadai Syariah (*Rahn*) dalam sistem hukum Jaminan Indonesia.

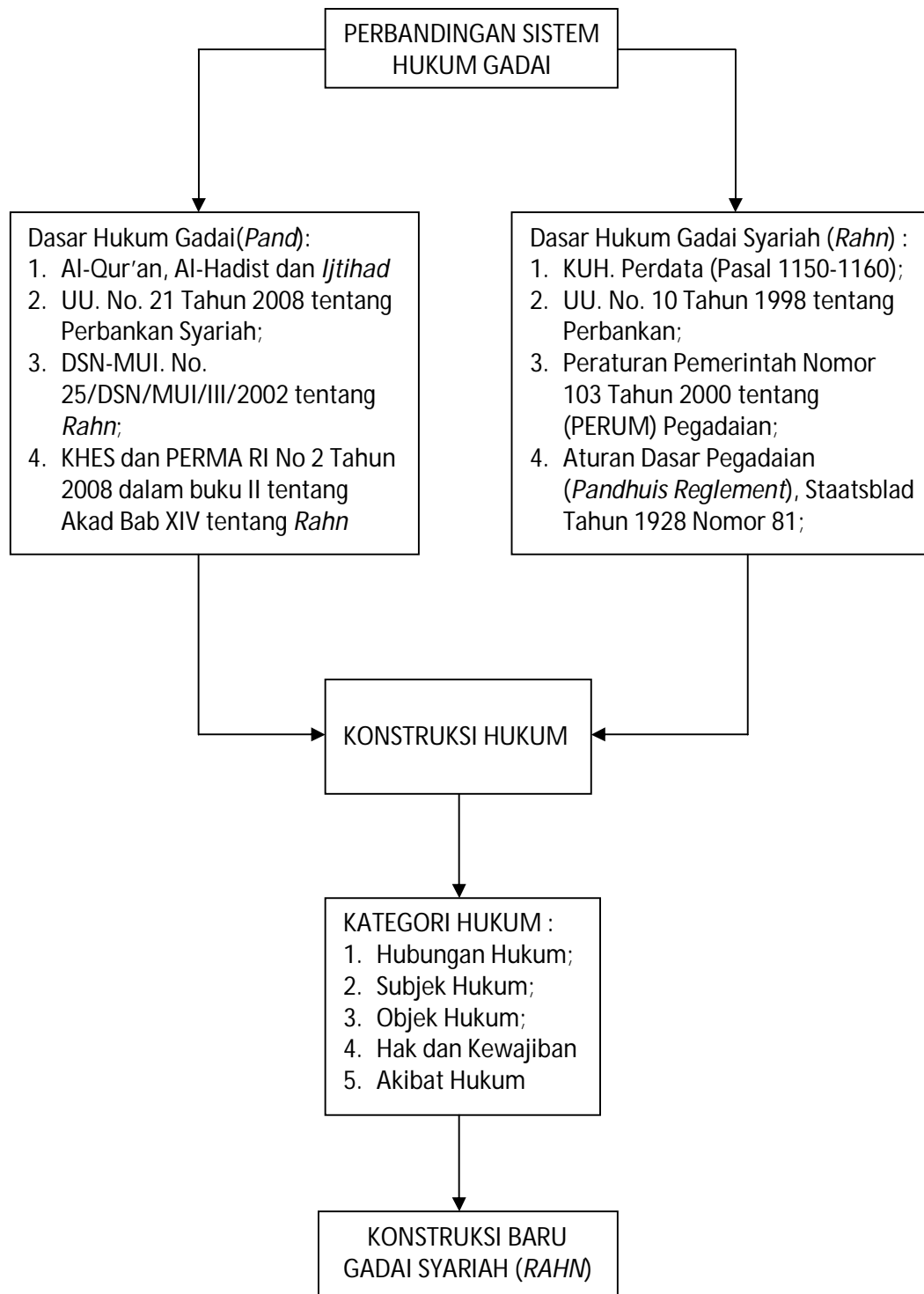
D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi :

1. Kontribusi Teoretis : Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang Hukum Jaminan Kebendaan.
2. Kontribusi Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya untuk memahami tentang perjanjian jaminan berupa Gadai Syariah (*Rahn*) dan penerapannya dalam praktik sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual :



2. Kerangka Teoretik :

Berbicara mengenai sistem hukum jaminan Indonesia, berarti berbicara mengenai susunan peraturan-peraturan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. J. Satrio mengatakan bahwa kita Indonesia belum memiliki sistem hukum jaminan.¹⁴ Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk keprihatinan seorang pakar hukum (perdata), mengingat pembangunan hukum perdata pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya sampai saat ini sangat lamban dan tidak dilakukan secara mendasar dengan menyusun prinsip-prinsip hukum jaminan yang akan dibuat. Pembangunan yang ada dilakukan secara parsial, hanya pada bagian-bagian khusus tertentu; sedangkan peraturan umumnya masih menginduk pada ketentuan yang ada dalam KUH.Perdata.

Sampai saat ini untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar hukum jaminan, harus melihat pada ketentuan yang ada dalam KUH. Perdata, khususnya Buku II, Bab XIX yang berjudul “Tentang piutang-piutang yang diistimewakan”, terdapat dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149.

Pasal 1133 KUH. Perdata, menyatakan :

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa menurut sistem KUH.Perdata, gadai adalah hak jaminan yaitu hak yang memberikan kepada seorang kreditor kedudukan yang lebih baik dibanding kreditor lain, karena didahulukan dalam mengambil pelunasan tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 6

diperikatkan. Karena obyek hak jaminannya tertuju pada benda, maka hak jaminan gadai bersifat kebendaan. Lembaga jaminan gadai hanya untuk benda-benda bergerak.

Secara umum di Indonesia terdapat dua sistem hukum positif yang mengatur lembaga Gadai, yaitu : KUH. Perdata dan ***Pandhuis reglement*** (Aturan Dasar Pegadaian/ADP), Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81. Aturan Gadai dalam KUH. Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 mengatur perjanjian gadai bagi masyarakat pada umumnya, dan untuk saat ini juga dipakai dalam penjaminan pada lembaga perbankan, khususnya untuk gadai emas dan surat-surat berharga.

Dalam Pasal 1150 KUH. Perdata disebutkan, bahwa :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Aturan gadai dalam ADP (Aturan Dasar Pegadaian) merupakan aturan gadai yang khusus berlaku pada Kantor Pegadaian/Perum Pegadaian di seluruh Indonesia. Perum pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai wewenang menyediakan pinjaman/kredit kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai yang secara khusus berlaku di lingkungan pegadaian seluruh Indonesia, yaitu Aturan Dasar Pegadaian/ADP (***Pandhuis Reglement***) Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928.

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad saw. yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.¹⁵

Dalam berkembang selanjutnya muncullah lembaga jaminan syariah yang dinamakan ***Rahn***. Kata “***Rahn***” menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Menurut istilah, *Rahn* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut syara’ sebagai jaminan utang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan ini seluruh atau sebagian uang dapat diberikan.¹⁶ Dalam hukum Islam dasar berlakunya *Rahn* terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist dan ijtihad para ahli hukum Islam (*fuqaha*).

Diterapkannya *Rahn* oleh Bank Syariah maupun Pegadaian Syariah, membawa konsekuensi hukum bahwa sekarang di Indonesia dikenal ada tiga jenis transaksi gadai, yaitu :

1. Gadai (*Pand*) menurut KUH. Perdata yang digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan usaha Bank Konvensional;
2. Gadai (*Verpanding*) menurut Aturan Dasar Pegadaian/ADP (*Pandhuis Reglement*) sebagai kegiatan usaha pokok pada Perum Pegadaian;

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 15

¹⁶ Warkum Sumitro, *Op. Cit.* hlm. 3

3. Gadai Syariah (*Rahn*) sebagai jaminan peminjaman uang pada kegiatan usaha Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Rahn* sebagai pola hubungan hukum baru di bidang transaksi jaminan, menimbulkan keadaan *vacuum* atau kekosongan hukum di bidang Gadai Syariah. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan alat bantu berupa konstruksi hukum yaitu tindakan analisis kritis untuk memahami suatu pola hubungan hukum sehingga dapat ditentukan bangunan hukumnya. Dalam hal ini **Paul Scholten** menjelaskan bahwa :

“konstruksi hukum dibutuhkan khususnya untuk memahami suatu hubungan hukum baru yang belum ada aturan hukum yang secara khusus mengaturnya, sehingga dapat ditentukan aturan hukumnya. Caranya adalah dengan menerapkan salah satu ketentuan hukum atau berbagai aturan hukum secara bersamaan atau model campuran. Kegiatan yang harus dilakukan adalah menyelidiki apa yang esensial dari suatu hubungan hukum itu, diantaranya dengan melakukan abstraksi, dan membuang semua bentuk kekhususannya dan pada akhirnya dapat ditentukan essensinya. Dengan demikian yang dinamakan konstruksi hukum adalah suatu tindakan analitis kritis untuk memahami suatu pola hubungan hukum sehingga dapat ditentukan bangunan hukumnya”.¹⁷

Berkaitan dengan konstruksi hukum, Paul Scholten menegaskan bahwa untuk melakukan suatu konstruksi hukum, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Konstruksi harus meliputi materi positif;
2. Tidak ada pertentangan di dalamnya;
3. Harus memenuhi syarat estetis.¹⁸

Ketiga hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁷ Paul Scholten, dalam Mr. C. Asser diterjemahkan oleh Siti Soemantri Hartono dengan judul *Penuntun dalam mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 64

¹⁸ *Ibid.* hlm. 67

- Ad 1. Konstruksi harus meliputi materi positif artinya tindakan konstruksi harus didasarkan pada hal-hal yang sifat pokok dan aturan hukum yang sedang berlaku untuk saat ini.
- Ad 2. Tidak ada pertentangan didalamnya artinya bahwa ilmu hukum, dalil abstrak mengenai hukum, dan ringkasannya dalam suatu pengertian menuntut kesatuan logis.
- Ad 3. Harus memenuhi syarat estetis artinya bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti, begitu juga ilmu hukum seperti halnya ilmu yang lain juga membutuhkan penggambaran yang jelas, disamping itu konstruksi harus juga berguna bagi tuntutan keadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁹ untuk itu diperlukan suatu metode yang tepat, metode sendiri merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

1. Metode Pendekatan

Untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konstruksi hukum gadai syariah (*rahn*) dalam sistem hukum jaminan Indonesia adalah **Metode Pendekatan Yuridis Normatif**(*legal research*), yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivistis. Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.²¹ Dimana secara deduktif diawali dengan menganalisa data-data baik data sekunder maupun penunjang data sekunder yang menyangkut mengenai permasalahan tersebut di atas. Metode ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, serta hubungan penerapannya dalam praktek.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.²³

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai Konstruksi Hukum Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 11

²² Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 4

²³ *Ibid.* hlm. 26-27

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :²⁴

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dalam KUH. Perdata, aturan Gadai pada Perum Pegadaian menurut Aturan Dasar Pegadaian/ADP (*Pandhuis Reglement*), aturan mengenai Perbankan Syariah, Al-Quran, Al-Hadist, *Ijma'* Ulama, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan Dokumen *Rahn* pada Kantor Pegadaian Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel (situs internet) dan diktat kuliah (*hand out*) yang berkaitan dengan materi Konstruksi Hukum Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier yang sifatnya melengkapi dan mendukung sehingga dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum tersebut di atas dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Arab Indonesia.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12

- b. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan Kepala Perum.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.Data Primer ini bersifat sebagai pendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Sekunder

Terhadap data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen dan arsip.

- b. Data Primer

Terhadap data primer diperoleh dengan cara wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung pada yang diwawancarainya. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data hasil penelitian, digunakan metode normatif kualitatif. Yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan data hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan

bertumpu pada penalaran deduksi logis yang mengikuti pola sederhana dari *syllogisme Aristotelian*. Dimana norma hukum *in abstracto* yang berupa peraturan hukum gadai yang berlaku bagi Perum Pegadaian Syariah dipergunakan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevant dalam perkara (*legal fact*) yang berupa perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Syariah ditempatkan sebagai premis minor. Melalui proses *syllogisme* yang menghubungkan kedua premis tersebut diperoleh kesimpulan (*conclusion*) berupa hukum positif *in concreto* yang dicari.²⁵

²⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, 1986, hlm. 12-13